IMPLEMENTASI ASTA SIAP

DALAM MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014

DAN PENJABARAN

KEBIJAKAN POLRI BIDANG OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SOPS POLRI

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB.

SALOOM.

OM SWASTI ASTU.

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

SELAMAT PAGI INDONESIA,

YANG SAYA HORMATI :

- **KAPOLRI**
- **WAKAPOLRI**
- **PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, DAN**
- **PARA PESERTA RAPIM TNI – POLRI TAHUN 2014.**

I. PENDAHULUAN

1. PEMILU MERUPAKAN SALAH SATU SENDI UNTUK TEGAKNYA SISTEM POLITIK DEMOKRASI DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI UNTUK MEMILIH WAKIL RAKYAT DI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, DAN MEMILIH KEPEMIMPINAN NASIONAL MELALUI PEMILIHAN SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL;
2. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 TELAH DAN SEDANG BERLANGSUNG, YANG TITIK PUNCAKNYA PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN PRESIDEN/WAPRES RI,

POTENSI KERAWANAN DALAM SETIAP TAHAPAN DAPAT MENIMBULKAN KERAWANAN YANG BERPENGARUH TERHADAP STABILITAS KAMTIBMAS;

3. GUNA MENGANTISIPASI KONDISI TERSEBUT, POLRI HARUS MEMPERSIAPKAN LANGKAH-LANGKAH MANAJERIAL YANG SALAH SATU BENTUK KESIAPANNYA ADALAH TERJABARKANNYA ASTA SIAP DI SELURUH SATUAN KEWILAYAHAN.

II. POKOK – POKOK KEBIJAKAN STRATEGI POLRI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI

DALAM SEMANGAT REFORMASI YANG KINI TERUS BERGULIR, POLRI JUGA SEDANG DAN TERUS MELAKSANAKAN PROSES REFORMASI POLRI UNTUK MENJADI CIVILIAN POLICE, DIMANA POLRI HARUS DAPAT MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERKEMBANGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN CARA MERUBAH PARADIGMA YANG MENITIK BERATKAN PADA PENDEKATAN YANG REAKTIF DAN KONVENSIONAL (KEKUASAAN) MENUJU PENDEKATAN YANG PROAKTIF DAN MENDAPAT DUKUNGAN PUBLIK DENGAN MENGEDEPANKAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMECAHAN MASALAH-MASALAH SOSIAL. DALAM PEMBINAAN KAMTIBMAS, POLRI TIDAK LAGI MENGUTAMAKAN TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TETAPI LEBIH MENGUTAMAKAN LANGKAH PENANGKALAN DAN PENCEGAHAN. PENEGAKAN HUKUM DILAKUKAN SEBAGAI ALTERNATIF TERAKHIR, JIKA CARA-CARA LAIN TIDAK LAGI MAMPU MEMBERI SOLUSI DENGAN MENGHINDARI TINDAKAN YANG BERLEBIHAN (EKSESIF) DAN MEMINIMALISIR KORBAN BAIK TERLUKA MAUPUN MENINGGAL DUNIA.

PARADIGMA BARU POLRI TERSEBUT MENJADI KERANGKA DALAM MEWUJUDKAN JATI DIRI, PROFESIONALISME DAN MODERNISASI POLRI SEBAGAI PENGAYOM, PELINDUNG DAN PELAYAN MASYARAKAT, BERADA DEKAT DAN MEMBAUR BERSAMA MASYARAKAT, SERTA PERLU DILAKUKANNYA PERUBAHAN PERILAKU MILITERISTIK MENUJU PERILAKU YANG HUMANISTIK DAN LEBIH BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT. DENGAN PERILAKU TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL (PROFESSIONAL

ACCOUNTABILITY) DAN DIPERCAYA MASYARAKAT (PUBLIC TRUST). UNTUK MEWUJUDKANNYA, DIPERLUKAN PERAN PIMPINAN KEPOLISIAN DAN JUGA KOMITMEN SEMUA ANGGOTA KEPOLISIAN. INILAH PARADIGMA YANG DIKENAL SEBAGAI COMMUNITY POLICING (POLMAS).

DEMIKIAN PULA HALNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM, POLRI MERUPAKAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG LANGSUNG BERHADAPAN DENGAN MASYARAKAT DAN DIBERI RUANG OLEH HUKUM UNTUK MENGAMBIL BERBAGAI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN TERHADAP TERHADAP ORANG YANG DICURIGAI TELAH MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI DAN ATURAN HUKUM YANG TELAH DITETAPKAN GUNA MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS DI MASYARAKAT.

SALAH SATU WUJUD PERUBAHAN POLRI ADALAH DISUSUNNYA BUKU BIRU POLRI PADA TAHUN 1999 YANG BERISI PERUBAHAN POLRI BAIK DI BIDANG INSTRUMENTAL, STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL SECARA BERKESINAMBUNGAN. PADA ERA KAPOLRI SUTANTO (2005 – 2008) DIKELUARKAN GRAND STRATEGI POLRI YANG MENCAKUP TIGA TAHAP PERUBAHAN POLRI MENUJU POLRI YANG PARIPURNA YAITU, TAHAP I TRUST BUILDING PELAKSANAAN PADA TAHUN 2005 – 2009, TAHAP II PARTNERSHIP BUILDING PELAKSANAAN PADA TAHUN 2010 – 2014 TERAKHIR TAHAP III STRIVE FOR EXCELLENCE PELAKSANAAN TAHUN 2015 – 2025.

AGAR REFORMASI BIROKRASI POLRI SEMAKIN KUAT PERLU PENGUATAN SEHINGGA DI ERA KAPOLRI BAMBANG HENDARSO DANURI (2008 – 2010) DISUSUN PROGRAM AKSELERASI DAN TRANSFORMASI POLRI. ERA TIMUR PRADOPO (2010 – 2013) MUNCUL PROGRAM REVITALISASI POLRI DAN DIKEMBANGKAN OLEH KAPOLRI BERIKUTNYA SUTARMAN MENJADI PROGRAM PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN MELIPUTI EMPAT BIDANG PENGUATAN YAITU BIDANG PEMBINAAN, OPERASIONAL, SINERGI POLISIONAL SERTA BIDANG PENGAWASAN. KESELURUHAN PROGRAM TERSEBUT DIPILAH DAN YANG MENJADI PRIORITAS KAPOLRI ADALAH 12 PROGRAM. 12 PROGRAM PENGUATAN TERSEBUT YANG LEBIH DI PRIORITASKAN ADA EMPAT JENIS YANG

SALAH SATUNYA ADALAH "**KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU DAN MENJAGA NETRALITAS POLRI**".

REFORMASI BIROKRASI POLRI PERLU TERUS DILANJUTKAN AGAR TERCIPTA KAMDAGRI YANG MANTAP DAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERWUJUD, OUTPUT DARI REFORMASI BIROKRASI ADALAH AGAR TERCIPTA POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL, MODERN DAN DIPERCAYA MASYARAKAT. DENGAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERJALAN OPTIMAL MAKA AKAN TERWUJUD RASA AMAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN TERCIPTANYA SUPREMASI HUKUM.

12 PROGRAM PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN YANG MENJADI PRIORITAS KAPOLRI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. MELAKUKAN PENGAMANAN PENGAMANAN PEMILU 2014 YANG DIWUJUDKAN MELALUI PEMANTAPAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DAN MENJAMIN NETRALITAS ANGGOTA POLRI
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI KASUS PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN.
3. MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERRORISME SERTA PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI
4. PENGUATAN INTEGRITAS SELURUH PERSONEL POLRI DALAM MENJALANKAN TUPOKSI, PERAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
5. PENGUATAN KAMTIBMAS DENGAN MENINGKATKAN EARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN ERLY WARNING (PERINGATAN DINI)
6. MENINGKATKAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT
7. PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA, CJS, SERTA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF TERUTAMA DIARAHKAN PADA PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

8. MENGEMBANGKAN SISBINPERS MELALUI REKRUTMEN DAN PEMBINAAN KARIER YANG BEBAS DARI KKN, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS UNTUK MENGHASILKAN PIMPINAN YANG BERINTEGRITAS DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN KETELADANAN DAN MELAYANI GUNA MEMBANGUN INTERNAL TRUST DAN PUBLIC TRUST.
9. MENINGKATKAN PROFESIONALISME YANG MELIPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIBIDANG HARKAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN MASYRAKAT.
10. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIC GUNA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST).
11. PENGUATAN SYSTEM PENGAWASAN YANG EFFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KKN.
12. PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI DAN MISI POLRI PADA GRAND STRATEGI POLRI 2005 – 2025, SELESAIKAN RENSTRA 2010 – 2014 SERTA MENYIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015 – 2019 DAN GRAND STRATEGI TAHAP III (2015 – 2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM RBP, QUICK WINS DAN PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT POLRI.

DARI 12 PROGRAM TERSEBUT DIPILAH MENJADI EMPAT PROGRAM YANG UTAMA, SEBAGAI BERIKUT :

1. KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN MENJAGA NETRALITAS POLRI
2. TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PADA SAAT SEHINGGA KEBERADAANNYA BENAR DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT
3. PENGUNGKAPAN KASUS - KASUS KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT
4. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA

III. PENGAMANAN PEMILU 2014

1. TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2009

a. PEMILU LEGISLATIF

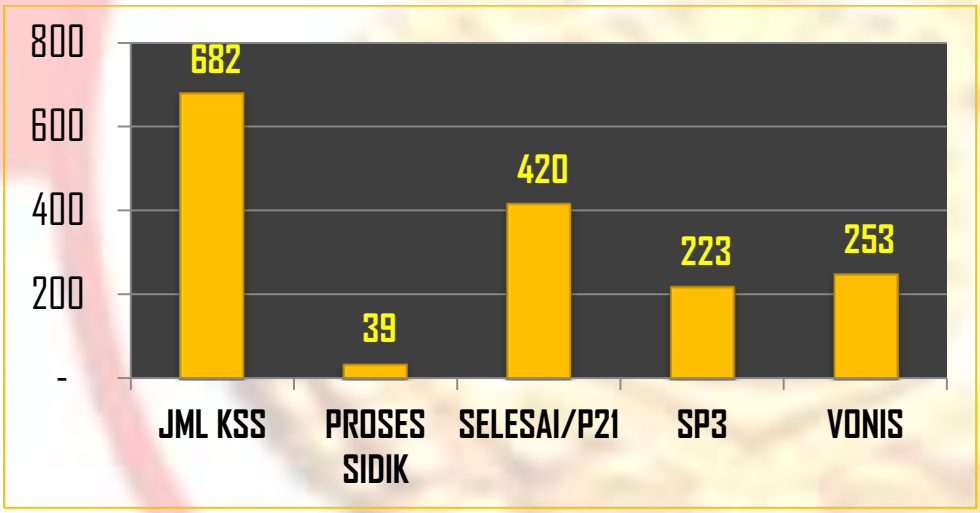

b. PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

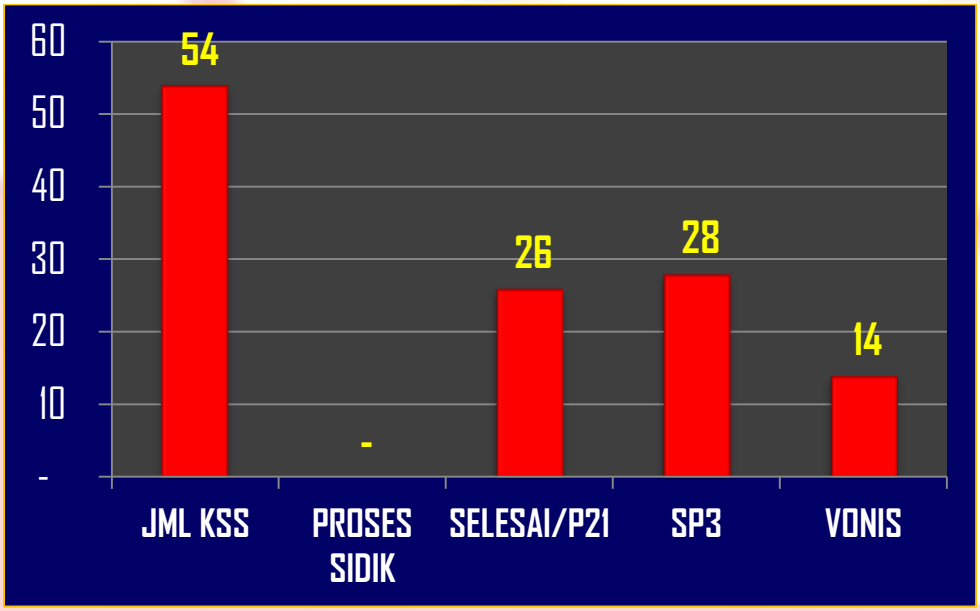

2. PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014

a. NOMOR URUT 1 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

b. NOMOR URUT 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

c. NOMOR URUT 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

d. NOMOR URUT 4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

e. NOMOR URUT 5 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

f. NOMOR URUT 6 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

g. NOMOR URUT 7 PARTAI DEMOKRAT

h. NOMOR URUT 8 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

i. NOMOR URUT 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

j. NOMOR URUT 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

k. NOMOR URUT 11 PARTAI DAMAI ACEH (PDA)

l. NOMOR URUT 12 PARTAI NASIONAL ACEH

m. NOMOR URUT 13 PARTAI ACEH

n. NOMOR URUT 14 PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

o. NOMOR URUT 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

3. ISU FAKTUAL TERKAIT PEMILU TAHUN 2014

a. KONTROVERSI PENETAPAN PARLIAMENTARY TRESHOLD /PT

b. DAFTAR PEMILIH TETAP YANG BELUM ADA KEPUTUSAN DARI KPU

c. PERMASALAHAN PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU PADA WILAYAH YANG SULIT DIJANGKAU TRANSPORTASI

d. PEREDARAN UANG PALSU MENJELANG PEMILU 2014 YANG SEMAKIN MARAK

4. PENTAHAPAN PEMILU LEGISLATIF

a. TAHAP PERSIAPAN

1) PENATAAN ORGANISASI TANGGAL 9 JUNI 2012 - 9 JUNI 2013

2) SELEKSI ANGGOTA KPU/KPUD BULAN JANUARI - DESEMBER 2013

3) PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TANGGAL 9 JUNI 2012 - 28 FEBRUARI 2014

4) LOGISTIK PEMILU TANGGAL 9 JUNI 2013 - 8 APRIL 2014

b. TAHAP PENYELENGGARAAN

1) PENYUSUNAN PERATURAN KPU TANGGAL 9 JUN 2012 - 9 JUN 2013

2) PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU TANGGAL 9 AGT 2012 - 15 MRT 2013

3) PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TANGGAL 9 NOV 2012 - 23 OKT 2013

4) PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN TANGGAL 10 DES 2012 - 9 MRT 2013

5) PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TANGGAL 6 APRIL - 7 OKT 2013

6) MASA KAMPANYE TANGGAL 16 MARET 2013 - 5 APRIL 2014

7) MASA TENANG TANGGAL 6 - 8 APRIL 2014

8) PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TANGGAL 9 APRIL 2014

9) REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TANGGAL 10 APR - 7 MEI 2014

10) PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU TANGGAL 7 S.D. 9 MEI 2014

11) PENGUCAPAN SUMPAH JANJI (DPRD KABUPATEN/KOTA, JULI S.D. AGUSTUS 2014, DPRD PROVINSI, AGUSTUS S.D. SEPTEMBER 2014 DAN DPRD/DPD, 1 OKOTBER 2014

c. TAHAP PENYELESAIAN

1) PERSELISIHAN HASIL PEMILU TANGGAL 12 S.D. 14 MEI 2014

2) PENYUSUNAN LAPORAN, DOKUMENTASI, ARSIP, PEMBUBARAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 1 OKT S.D. 31 DESEMBER 2014

5. PENTAHAPAN PEMILU PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN

HINGGA SAAT INI PENTAHAPAN PEMILU PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN MASIH DIBAHAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM.

6. PERKIRAAN ANCAMAN

a. PROTES DAN UNJUK RASA (BERUJUNG TINDAKAN ANARKHIS)

b. BENTROK MASSAL

c. SABOTASE

d. TEROR DAN INTIMIDASI

e. BLACK CAMPAIGN DAN MONEY POLITIC

f. MANIPULASI HASIL SUARA/PENGGELEMBUNGAN SUARA

g. KEJAHATAN KONVENSIONAL, SEPERTI : PERUSAKAN, PEMBAKARAN, PENGANCAMAN, PENCULIKAN, PEMBUNUHAN, PENGANIAYAAN, PEMALSUAN, PENCURIAN, DSB

h. PELANGGARAN PEMILU LAINNYA

i. PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS

7. POTENSI KERAWANAN PADA TAHAPAN PEMILU

a. DISTRIBUSI LOGISTIK

1) DISTRIBUSI LOGISTIK TERLAMBAT;

2) PERALATAN / PERLENGKAPAN DICURI, DIGANDAKAN, DIPALSUKAN, DIBAKAR;

3) KORUPSI PENYEDIAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN DAN PENDISTRIBUSIAN;

b. KAMPANYE

1) PROTES DARI PARPOL LAIN KEPADA PARPOL YANG MENDAHULUI/CURI START KAMPANYE DAN BLACK CAMPAIGN, MONEY POLITIK;

2) PROTES DARI PARPOL KARENA ADANYA DISKRIMINASI ATAU KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN KAMPANYE;

3) RUSUH MASSAL ANTAR PENDUKUNG PARPOL ATAU CALON;

4) SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN/PENCULIKAN;

5) PELANGGARAN, KECELAKAAN DAN KEMACETAN LALU LINTAS;

6) KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA;

c. MASA TENANG

1) SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN/PENCULIKAN;
2) MONEY POLITIK, BLACK CAMPAIGN;
3) KECURANGAN TERTENTU (ALAT PERAGA MASIH TERPASANG DLL)
4) ISU SARA;
5) KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA;

d. PEMUNGUTAN SUARA

1) PROTES DARI ELEMEN MASYARAKAT DAN SAKSI-SAKSI ATAS KETIDAK SIAPAN/KELALAIAN PETUGAS TPS;
2) SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN;
3) MONEY POLITIC;
4) MANIPULASI SUARA ATAU PENGGELEMBUNGAN SUARA;
5) UNJUK RASA;
6) INTIMIDASI DAN PEMAKSAAN KEPADA MASYARAKAT PEMILIH;
7) PENOLAKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA;
8) KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA;

e. REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA

1) PROTES DARI ELEMEN MASYARAKAT;
2) SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN;
3) MONEY POLITIC;
4) MANIPULASI SUARA ATAU PENGGELEMBUNGAN SUARA;
5) UNJUK RASA;
6) KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA;

f. PENETAPAN CALON TERPILIH

1) PENOLAKAN HASIL PENGHITUNGAN;
2) PENGERAHAN MASSA;
3) PENCULIKAN;
4) PEMBAKARAN;
5) SABOTASE;

g. PELANTIKAN/SUMPAH JANJI

1) UNJUK RASA;

2) SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN/PENCULIKAN;

3) KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA;

8. TUGAS POKOK

POLRI BERSAMA SELURUH KEKUATANNYA, DIBANTU TNI & MITRA KEAMANAN LAINNYA MELAKSANAKAN OPS KEPOL TERPUSAT DGN SANDI OPS "MANTAP BRATA – 2014" OPS DILAKSANAKAN SELAMA 224 HARI DISELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MELAKSANAKAN PENGAMANAN KEGIATAN DENGAN MENGEDEPANKAN GIAT PREEMTIF & PREVENTIF, YANG DIDUKUNG GIAT INTELIJEN, REPRESIF, KURATIF & REHABILITASI DALAM RANGKA MENGAMANKAN SETIAP TAHAPAN INTI PEMILU GUNA MEWUJUDKAN SITUASI KAMDAGRI YG KONDUSIF & KAMSELTIBCARLANTAS TERJAMIN

9. TUJUAN DAN SASARAN OPERASI

a. TUJUAN OPERASI

1) TERSELENGGARANYA SELURUH KEGIATAN TAHAPAN INTI PEMILU 2014 DENGAN AMAN, LANCAR DAN TERTIB

2) TERJAMINNYA RASA AMAN PARA PENYELENGGARA DAN PESERTA PEMILU 2014 SERTA MASYARAKAT DAPAT HADIR KE TPS UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN TENANG DAN TERBEBAS DARI RASA TAKUT AKAN ANCAMAN DALAM BENTUK APAPUN

3) TERWUJUDNYA SITUASI DAN KONDISI KAMTIBMAS YANG AMAN, KONDUSIF DAN TERKENDALI SELAMA PEMILU 2014

b. SASARAN OPERASI

SEGALA BENTUK POTENSI GANGGUAN (PG), AMBANG GANGGUAN (AG) DAN GANGGUAN NYATA (GN) PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT MENGHAMBAT, MENGGANGGU DAN MENGGAGALKAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2014

10. TARGET OPERASI

a. ORANG:

1) PERSONEL KPU, KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, KPPS DAN TPS;

2) PERSONEL BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/ KOTA/KECAMATAN;

3) PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH DAN JURU KAMPANYE;

4) CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA;

5) PENGAMAT/PEMANTAU PEMILU;

6) MASYARAKAT PEMILIH.

b. BENDA:

1) KANTOR KPU, KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, KPPS DAN TPS;

2) KANTOR BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN;

3) SARANA PRASARANA PEMILU SEPERTI KOTAK SUARA, SURAT SUARA SERTA KELENGKAPAN LAINNYA (LOGISTIK PEMILU).

c. LOKASI:

1) LOKASI ATAU TEMPAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU;

2) AREA TPS DAN TEMPAT-TEMPAT LAINNYA (TITIK RAWAN DAN STRONG POINT);

3) LOKASI ATAU TEMPAT UNTUK REKAPITULASI, PENGHITUNGAN SUARA, SIDANG/RAPAT PLENO DAN PENETAPAN HASIL PEMILU OLEH KPU/KPUD;

4) LOKASI ATAU TEMPAT DAN GEDUNG YANG DIGUNAKAN UNTUK PELANTIKAN/SUMPAH JANJI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERPILIH.

d. KEGIATAN:

1) SETIAP TAHAPAN PEMILU TAHUN 2014;

2) PROSES CETAK, PENGAMBILAN DARI PERCETAKAN, SIMPAN DAN GERAK ATAU DISTRIBUSI SURAT SUARA DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KE TEMPAT TUJUAN;

3) GERAK PENGIRIMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA.

11. CARA BERTINDAK

a. MELAKSANAKAN DETEKSI DINI DENGAN PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN ATAU INFORMASI GUNA ANTISIPASI DAN MENCEGAH ANCAMAN DARI PIHAK YANG AKAN MENGGANGGU SERTA MENGGAGALKAN PEMILU

b. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN TANGKAL DENGAN KEGIATAN PENGATURAN, PENJAGAAN DAN PATROLI SERTA BIMBINGAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMBENTUK OPINI YANG MENGUNTUNGKAN BAGI KEGIAT OPERASI

c. MELAKSANAKAN PENINDAKAN BERUPA UPAYA PAKSA KEPADA PELAKU KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI KEGIATAN PENYIDIKAN PADA PARA PELANGGAR TINDAK PIDANA PEMILU

d. KURATIF, PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KORBAN KONFLIK / BENCANA

e. REHABILITASI KORBAN AKIBAT KONFLIK / BENCANA SELAMA OPERASI MANTAP BRATA 2014

12. DAERAH OPERASI

OPERASI DILAKSANAKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YAITU :

a.	PROVINSI	:	33	DAERAH
b.	KABUPATEN	:	413	DAERAH
c.	KOTA	:	98	DAERAH
d.	KECAMATAN	:	5.524	DAERAH
e.	KEL/DESA	:	79.075	DAERAH

f. TPS : 561.393 TPS

WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YAITU :

a. POLDA : 31 WILAYAH
b. POLRESTABES : 4 WILAYAH
c. POLRES METRO : 6 WILAYAH
d. POLRESTA : 20 WILAYAH
e. POLRES : 415 WILAYAH
f. POLSEK/POLSEKTA/POLSEKTRO : 4.736 WILAYAH

DI LUAR NEGERI YAITU : MALAYSIA, SINGAPURA DAN HONGKONG

13. PENTAHAPAN OPERASI

a. TAHAP PERSIAPAN

1) MEMPERSIAPKAN, MENGINVENTARISASI DAN MENYUSUN DATA AWAL OPERASI
2) MELAKUKAN KESEPAKATAN BERSAMA ATAU MoU DENGAN KEMENTERIAN DAN KELEMBAGAAN TERKAIT DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILU
3) ANALISA DAN EVALUASI DATA AWAL UNTUK KETAJAMAN PENENTUAN SASARAN SECARA SELEKTIF PRIORITAS
4) MEMPERSIAPKAN PIRANTI LUNAK DAN PIRANTI KERAS SERTA ORGANISASI SATUAN TUGAS TERMASUK PENYIAPAN POSKO
5) PENYIAPAN PERSONEL, LOGISTIK, MATERIIL DAN ANGGARAN
6) MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI ANTARFUNGSI MAUPUN ANTARINSTANSI TERKAIT
7) MELAKSANAKAN LATIHAN PRA OPERASI (LATPRAOPS)
8) MELAKSANAKAN APEL PENGECEKAN KESIAPAN AKHIR ATAU GELAR PASUKAN

9) MELAKSANAKAN PERGESERAN PERSONEL KE DAERAH OPERASI ATAU TEMPAT-TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN (KPU, BAWASLU, PANWASLU, TPS, DLL)

b. TAHAP PELAKSANAAN

1) PENGERAHAN SATUAN TUGAS OPERASI

2) POLA PENGAMANAN PEMILU

a) PENGAMANAN TPS (**POLRI** : LINMAS : TPS)

TPS AMAN : **2** : 10 : 5

4 : 20 : 10

TPS RAWAN I : **2** : 4 : 2

TPS RAWAN II : **2** : 4 : 1

b) PENGAMANAN CAPRES DAN WAPRES (WAL PERJALANAN/ESCORT, PAM PENDAHULUAN /ADVANCE, WAL PRIBADI /WALPRI, AJUDAN /ADC, TIM TINDAK, TIM KESEHATAN DAN FOOD SECURITY, PERWIRA PENGHUBUNG

POLA & WKT PAM TIAP 1 CAPRES/CAWAPRES DGN **SISTEM 3 PLOEG** DISESUAIKAN TKT KERAWANAN & KEBUTUHAN:

- ✓ PAM PENDAHULUAN (ADVANCE) DARI FUNGSI INTELIJEN, RESKRIM, SATWA DAN PAMOBVIT SEBANYAK 7 ORANG, ”3 ORANG BERTUGAS SELAMA 12 JAM”
- ✓ WAL PERJALANAN DR FUNGSI LANTAS DLM BENTUK RANGKAIAN KONVOI :
  - ➢ KAWAL DEPAN (ESCORT) 4 ORANG (RD 2 SEBANYAK 2 ORANG DAN RD 4 SEBANYAK 2 ORANG)
  - ➢ KAWAL BELAKANG (ESCORT) RD 4 ”2 ORANG”
  - ➢ 6 ORANG BERTUGAS 12 JAM

- ✓ WALPRI DEPAN (15 ORANG) DAN WALPRI BELAKANG (15 ORANG) DR FUNGSI RESKRIM DAN BRIMOB POLRI, TIAP 5 ORANG BERTUGAS 12 JAM
- ✓ AJUDAN (9 ORANG) DARI PAMA ATAU PAMEN POLRI, TIAP 3 ORANG 12 JAM
- ✓ TIM TINDAK DARI FUNGSI BRIMOB POLRI (15 ORANG) TIAP 5 ORANG 12 JAM
- ✓ TIM KESEHATAN DAN FS (9 ORANG) DARI FUNGSI DOKKES POLRI, TIAP 3 ORANG 12 JAM
- ✓ PERWIRA PENGHUBUNG (3 ORANG) DARI FUNGSI INTELIJEN ATAU RESKRIM POLRI, TIAP 1 ORANG 12 JAM

3) TAHAP KONSOLIDASI

a) MELAKSANAKAN WASH UP / KAJI ULANG TERHADAP PELAKSANAAN OPERASI YANG MELIPUTI ANEV OPS & INVENTARISASI KEKUATAN

b) MENARIK PERSONEL DARI POS-POS PENGAMANAN TERDEPAN

c) MENYIAPKAN DAN MENYUSUN LAPORAN AKHIR HASIL PELAKSANAAN OPERASI

14. PELIBATAN KEKUATAN

TOTAL KEKUATAN YANG TERLIBAT DALAM OPERASI MANTAP BRATA – 2014 SEJUMLAH **1.500.2019** ORANG, MELIPUTI POLRI 253.497 ORANG, PERKUATAN TNI 23.450 ORANG SERTA LINMAS SEBANYAK 1.223.272 ORANG, RINCIAN PERKUATAN SEBAGAI BERIKUT :

a. MABES POLRI SEBANYAK 4.973 ORANG DENGAN RINCIAN :

1) UNSUR PIMPINAN : 14 ORG

2) STAF OPERASI : 83 ORG

3) SATGAS OPS PUS : 4.876 ORG

b. POLDA SEBANYAK 248.524 ORANG, ATAU 2/3 KEKUATAN DARI KUAT RIIL YANG ADA DI SELURUH POLDA SEBESAR 372.786 ORANG

1)	ACEH	: 8.758	ORG
2)	SUMUT	: 12.730	ORG
3)	SUMBAR	: 6.389	ORG
4)	RIAU	: 6.607	ORG
5)	KEPRI	: 2.547	ORG
6)	SUMSEL	: 8.095	ORG
7)	BABEL	: 2.057	ORG
8)	BENGKULU	: 2.890	ORG
9)	JAMBI	: 4.323	ORG
10)	LAMPUNG	: 6.335	ORG
11)	METRO JAYA	: 19.877	ORG
12)	JABAR	: 20.029	ORG
13)	BANTEN	: 3.378	ORG
14)	JATENG	: 23.567	ORG
15)	DIY	: 6.564	ORG
16)	JATIM	: 27.257	ORG
17)	KALBAR	: 6.481	ORG
18)	KALSEL	: 5.044	ORG
19)	KALTENG	: 3.980	ORG
20)	KALTIM	: 5.989	ORG
21)	BALI	: 8.135	ORG
22)	N T B	: 5.267	ORG
23)	N T T	: 6.465	ORG
24)	SULSEL	: 12.889	ORG
25)	SULTRA	: 3.975	ORG
26)	SULTENG	: 5.419	ORG
27)	SULUT	: 4.947	ORG
28)	GRTALO	: 2.185	ORG
29)	MALUKU	: 4.530	ORG
30)	MALUT	: 2.519	ORG

31) PAPUA : 9.295 ORG

c. KEKUATAN SATUAN SAMPING

1) TNI : 23.450 ORG

2) LINMAS : 1.223.272 ORG

15. POLA PENGGELARAN PERSONEL

a. PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

1) KAMPANYE, MASA TENANG, PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA KEKUATAN YANG DILIBATKAN SEBESAR 2/3 KEKUATAN DARI JUMLAH KEKUATAN RIIL YANG DIMILIKI POLRI.

2) PENETAPAN HASIL PEMILU, PENETAPAN KURSI DAN CALON SERTA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI KEKUATAN YANG DILIBATKAN SEBESAR 1/3 KEKUATAN DARI JUMLAH KEKUATAN RIIL YANG DIMILIKI POLRI.

b. PEMILIHAN UMUM PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN

1) PUTARAN PERTAMA DAN KEDUA (BILA ADA)

a) KAMPANYE, MASA TENANG, PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 2/3 KEKUATAN.

b) PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN SUARA NASIONAL 1/3 KEKUATAN.

2) PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2/3 KEKUATAN ORGANIK

UNTUK SISTEM PERBANTUAN YANG MELIBATKAN ANGGOTA TNI DENGAN KETENTUAN :

a. POLDA TIPE A : 1 SATUAN SETINGKAT BATALYON (SSY)

b. POLDA TIPE B : 1 SATUAN SETINGKAT KOMPI (SSK)

c. POLRES/TA : 1 SATUAN SETINGKAT PELETON (SST)

SELAIN MELIBATKAN TNI POLRI DALAM PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 JUGA MELIBATKAN SATUAN LINMAS UNTUK PENGAMANAN DI DALAM LOKASI TPS DAN PENGAMANAN LOGISTIK PEMILU.

DALAM MENGHADAPI SITUASI KONTINJENSI AKIBAT DARI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM AGAR KEWILAYAHAN JUGA MENYIAPKAN RENCANA KONTINJENSI PEMILU DAN SISTEM PENGAMANAN KOTA, SEHINGGA APABILA TERJADI CHAOS POLRI SUDAH SIAP DALAM MENANGANINYA.

16. STRUKTUR ORGANISASI

a. TINGKAT MABES POLRI

1) PENANGGUNG JAWAB KEBIJAKAN OPERASI DIJABAT OLEH KAPOLRI DENGAN WAKIL PENANGGUNG JAWAB WAKAPOLRI
2) KARENDALOPSPUS DIJABAT OLEH ASOPS KAPOLRI
3) KAOPSPUS DIJABAT OLEH KABAHARKAM DENGAN WAKIL KAKORBRIMOB POLRI
4) KASETOPSPUS DIJABAT OLEH KARO BINOPS SOPS POLRI
5) KAPUSDATAOPSPUS DIJABAT OLEH KARODALOPS SOPS POLRI
6) SATGAS 1 DIJABAT DIRPOLITIK BAINTELKAM
7) SATGAS 2 DIJABAT OLEH DIRSABHARA BAHARKAM POLRI
8) SATGAS 3 DIJABAT OLEH WAKA KORBRIMOB POLRI
9) SATGAS 4 DIJABAT OLEH DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
10) SATGAS 5 DIJABAT OLEH DIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI
11) SATGAS 6 DIJABAT OLEH SESNCB INTERPOL POLRI
12) SATGAS 7 DIJABAT OLEH DIR POLAIR BAHARKAM POLRI

b. TINGKAT POLDA

1) KAOPSDA DIJABAT OLEH KAPOLDA DENGAN WAKIL WAKAPOLDA
2) KARENDALOPSDA DIJABAT OLEH KAROOPS POLDA
3) KASETOPSDA DIJABAT OLEH KABAG BINOPS POLDA

4) KAPUSDATAOPSDA DIJABAT OLEH KABAG DALOPS POLDA

5) DALAM PELAKSANAANNYA KAPOLDA DAPAT MENUNJUK KASATGASOPSDA DAN WAKASATGASOPSDA APABILA DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN OPERASI

c. PENJABARAN SATGAS MABES POLRI

1) SATGAS 1

DIPIMPIN OLEH DIRPOLITIK BAINTELKAM POLRI DENGAN PERKUATAN SEBANYAK 40 ORANG DENGAN TUGAS DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN PENYULUHAN, TERDIRI DARI DUA SUBSATGAS, TERDIRI ATAS SUBSATGAS :

a) SUBSATGAS INTELKAM

DIPIMPIN WADIR POLITIK BAINTELKAM POLRI DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 30 ORANG, TUGAS :

- MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN BERUPA KEGIATAN MENGAWALI, MENYERTAI DAN MENGAKHIRI BERKAITAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI PRA, SAAT DAN PASCA PEMILU
- MELAKSANAKAN DETEKSI DINI DENGAN KEGIATAN PENYELIDIKAN, PENGGALANGAN, OBSERVASI DAN PEMETAAN SERTA PENAJAMAN TO KEMUNGKINAN ADANYA ANCAMAN DAN GANGGUAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU

- MELAKUKAN PENGGALANGAN TERHADAP TIM SUKSES, KELOMPOK PENDUKUNG MAUPUN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK SIAP MENERIMA HASIL PEMILU SECARA DAMAI DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM

PENUGASAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

b) SUBSATGAS BINMAS

DIPIMPIN KASUBDIT BINTIBMAS BAHARKAM POLRI POLRI DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 10 ORANG, TUGAS :

- MELAKSANAKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI AKSIF MENSUKSESKAN PEMILU
- MELAKSANAKAN SOSIALISASI KEPADA TOKOH – TOKOH POLITIK, PARPOL, KADER DAN TIM SUKSES AGAR TIDAK MELANGGAR ATURAN DAN PERUNDANGAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU
- MELAKUKAN PENYULUHAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA CEGAH DAN DAYA TANGKAL TERHADAP UPAYA PROVOKASI/HASUTAN DARI KELOMPOK YANG INGIN MENGGANGGU ATAU MENGANCAM PELAKSANAAN PEMILU

PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

2) SATGAS 2

DIPIMPIN OLEH DIRSABHARA BAHARKAM POLRI DENGAN PERKUATAN SEBANYAK 245 ORANG DENGAN TUGAS PENCEGAHAN DENGAN KEGIATAN

PENGATURAN, PENJAGAAN DAN PATROLI PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU, TERDIRI ATAS SUBSATGAS :

a) SUBSATGAS SABHARA

DIPIMPIN KASSUBAGOPSNAL DITSABHARA BAHARKAM POLRI POLRI DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 30 ORANG, TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENGATURAN, PENJAGAAN DAN PATROLI PADA :

- KANTOR PENYELENGGARA PEMILU (KPU, DKPP, KPUD, BAWASLU DAN PANWASLU)
- TEMPAT PENYIMPANAN ATAU DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU, LOKASI KAMPANYE, PENGHITUNGAN, REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEMILU
- TEMPAT PELANTIKAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH

PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

b) SUBSATGAS SATWA

DIPIMPIN KASUBDIT CAKKAL DITSATWA BAHARKAM POLRI POLRI DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 75 ORANG, TUGAS :

- MELAKSANAKAN STERILISASI PADA TEMPAT KEDIAMAN CAPRES DAN CAWAPRES SERTA LOKASI KAMPANYE
- MELAKUKAN STERILISASI DIBANTU SATWA K-9 PADA TEMPAT/LOKASI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELANTIKAN

ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH

- MELAKUKAN KEGIATAN PATROLI DAN PENJAGAAN MENGGUNAKAN SATWA TURANGGA DAN K-9

PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

c) SUBSATGAS LANTAS

DIPIMPIN KASUBDENPATROLI PJR KORLANTAS POLRI DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 72 ORANG, DENGAN TUGAS :

- MELAKUKAN PENGATURAN, PENJAGAAN DAN PENGENDALIAN SERTA PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS DISEKITAR LOKASI KAMPANYE, TEMPAT PELANTIKAN / SUMPAH JANJI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH
- MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS YANG DILAKUKAN MASSA KAMPANYE
- MELAKUKAN PENGAWALAN RUTE, LOKASI PARKIR SERTA PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS TERHADAP PESERTA KAMPANYE
- PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP MASSA KAMPANYE DILENGKAPI DENGAN DOKUMENTASI (FOTO / VIDEO)

PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

3) SATGAS 3

DIPIMPIN OLEH WAKAKORBRIMOB POLRI DENGAN PERKUATAN SEBANYAK 2.500 ORANG DENGAN TUGAS PENINDAKAN YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN PHH, JIBOM, WANTEROR, SAR DAN ANTI ANARKHIS, TERDIRI ATAS SUBSATGAS :

a) SUBSATGAS PHH WILAYAH BARAT

DIPIMPIN KASAT II PELOPOR KORBRIMOB POLRI, DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 1.000 ORANG, DENGAN TUGAS MELAKUKAN PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN UNJUK RASA ANARKHIS YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU DI WILAYAH BARAT INDONESIA

b) SUBSATGAS PHH WILAYAH TIMUR

DIPIMPIN KASAT III PELOPOR KORBRIMOB POLRI, DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 1.000 ORANG, TUGAS MELAKUKAN PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN UNJUK RASA ANARKHIS YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU DI WILAYAH TIMUR

c) SUBSATGAS WANTEROR DAN JIBOM

DIPIMPIN KASAT I GEGANA KORBRIMOB POLRI, DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 30 ORANG, DENGAN TUGAS

- MELAKUKAN STERILISASI PADA LOKASI, TEMPAT DAN KEGIATAN PEMILU
- MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA TKP LEDAKAN BOM

- MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP ANCAMAN TERORISME PADA PELAKSANAAN PEMILU

PLOTING PENUGASAN DI SELURUH WILAYAH HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

d) SUBSATGAS SAR

DIPIMPIN KADEN D SAT II PELOPOR KORBRIMOB POLRI, DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 110 ORANG, DENGAN TUGAS MELAKUKAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN JIWA SERTA PERTOLONGAN, EVAKUASI BENCANA ATAU MUSIBAH SELAMA OPERASI BERLANGSUNG

PLOTING PENUGASAN DI SELURUH WILAYAH HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

e) SUBSATGAS ANTI ANARKHIS

DIPIMPIN WAKASAT I GEGANA KORBRIMOB POLRI, DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 300 ORANG, DENGAN TUGAS MELAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK KERUSUHAN MASSAL / TINDAKAN ANARKISME YANG DILAKUKAN MASSA BERKAITAN DENGAN PEMILU

PLOTING PENUGASAN DI SELURUH WILAYAH HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

4) SATGAS 4

DIPIMPIN OLEH DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI DENGAN PERKUATAN SEBANYAK 30 ORANG DENGAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMILU. DALAM TUGASNYA DIDUKUNG SUBSATGAS RESKRIM YANG DIPIMPIN OLEH KASUBDIT IV DITTIPIDUM BARESKRIM POLRI, DENGAN TUGAS :

- MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU
- MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN JPU DAN BAWASLU DALAM WADAH GAKKUMDU DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKAITAN DENAGN TINDAK PIDANA PEMILU

PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

5) SATGAS 5

DIPIMPIN OLEH DIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI DENGAN PERKUATAN SEBANYAK 1.116 ORANG DENGAN TUGAS PENGAMANAN TERHADAP CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, TERDIRI ATAS SUBSATGAS :

a) SUBSATGAS ADVANCE

DIPIMPIN KADENPAM OPSNAL DITPAMOBVIT BAHARKAM POLRI, DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 180 ORANG, DENGAN TUGAS

- MELAKUKAN SURVEY LAPANGAN DAN PENGAMANAN PENDAHULUAN TERHADAP TEMPAT ATAU LOKASI YANG AKAN DIKUNJUNGI CAPRES/CAWAPRES

- MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT DAN UNSUR TERKAIT BERKENAAN DENGAN KEGIATAN DAN ATAU TEMPAT / LOKASI YANG DIKUNJUNGI OLEH CAPRES / CAWAPRES BESERTA KELUARGANYA

b) WALROLAKIR

DIPIMPIN KADENPAM OPSNAL DITPAMOBVIT BAHARKAM POLRI, DENGAN PERKUATAN YANG DIKERAHKAN SEBANYAK 180 ORANG, DENGAN TUGAS

- MELAKUKAN SURVEY LAPANGAN DAN PENGAMANAN PENDAHULUAN TERHADAP TEMPAT ATAU LOKASI YANG AKAN DIKUNJUNGI CAPRES/CAWAPRES
- MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT DAN UNSUR TERKAIT BERKENAAN DENGAN KEGIATAN DAN ATAU TEMPAT / LOKASI YANG DIKUNJUNGI OLEH CAPRES / CAWAPRES BESERTA KELUARGANYA

c) WALPRI

DIPIMPIN OLEH PAMEN BAINTELKAM POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 360 ORANG, DENGAN TUGAS:

- BERGERAK, MENGIKUTI ATAU MENDAMPINGI LANGSUNG UNTUK MELINDUNGI, MENGAMANKAN DAN MENYELAMATKAN CAPRES/CAWAPRES SEBAGAI TIRAI HIDUP;
- MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP GERAKAN MASYARAKAT DI SEKITAR

CAPRES/CAWAPRES UNTUK ANTISIPASI TERHADAP SERANGAN FISIK YANG DITUJUKAN KEPADA CAPRES/CAWAPRES BAIK MELALUI PENGAMANAN TERBUKA MAUPUN TERTUTUP;

- MELAKUKAN TINDAKAN PENYELAMATAN (ESCAPE) APABILA TERJADI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP CAPRES/ CAWAPRES;

d) PAMMATAN (PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN)

DIPIMPIN OLEH KADEN C SAT I GEGANA KORBRIMOB POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 180 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MELAKUKAN PERTAHANAN, SERANGAN BALASAN, PERLAWANAN DAN PERLINDUNGAN SERTA MELUMPUHKAN LAWAN YANG MELAKUKAN PENYERANGAN TERHADAP CAPRES/CAWAPRES;
- SEBAGAI SATUAN PENGAMAN, PELINDUNG SERTA PENINDAK TERHADAP ANCAMAN/GANGGUAN KEPADA CAPRES/ CAWAPRES;
- MELAKUKAN TINDAKAN PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN (ESCAPE) APABILA TERJADI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP CAPRES/ CAWAPRES;

e) KESEHATAN

DIPIMPIN OLEH KABAGBINOPSNALMED PUSDOKKES POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 108 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MELAKSANAKAN FOOD SAFETY BAGI CAPRES DAN CAWAPRES DAN KELUARGANYA;
- MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI CAPRES/CAWAPRES BESERTA KELUARGANYA;

f) ADC / AJUDAN

DIPIMPIN OLEH PERWIRA POLRI YANG DITUNJUK DENGAN TUGAS:

- MENYIAPKAN JADWAL KEGIATAN DAN PERLENGKAPAN YANG AKAN DIGUNAKAN CAPRES/CAWAPRES;
- MEMBAWA DAN ATAU MENGAMANKAN KELENGKAPAN PERALATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN YANG SEGERA AKAN DILAKSANAKAN CAPRES/CAWAPRES;
- MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN CAPRES/ CAWAPRES DENGAN INSTANSI TERKAIT DAN TURUT SERTA MELAKSANAKAN PENGAMANAN TERHADAP CAPRES/ CAWAPRES;

6) SATGAS 6

KASATGAS 6 DIPIMPIN OLEH SES NCB INTERPOL INDONESIA DENGAN TUGAS PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU DI LUAR NEGERI, PERKUATAN SEBANYAK 16 ORANG YANG TERDIRI SUBSATGAS:

- SUBSATGAS HUBINTER YANG DIPIMPIN OLEH KABAGLOTAS SET NCB INTERPOL INDONESIA, PERKUATAN SEBANYAK 8 ORANG;
- SUBSATGAS SOPS YANG DIPIMPIN OLEH KABAGRENOPS SOPS POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 8 ORANG;

SUBSATGAS HUBINTER DAN SOPS BERTUGAS MELAKUKAN MONITORING DAN PEMANTAUAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN (MALAYSIA, SINGAPURA, HONGKONG DAN ARAB SAUDI). DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA BERKOORDINASI DENGAN KEDUBES/KONJEN RI DAN ATPOL/STP YANG ADA DI NEGARA TERSEBUT;

7) SATGAS 7

KASATGAS 7 DIPIMPIN OLEH DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI DENGAN TUGAS SEBAGAI BANTUAN/DUKUNGAN OPERASI, PERKUATAN SEBANYAK 997 ORANG YANG TERDIRI DARI SUBSATGAS:

a) SUBSATGAS POLAIR

DIPIMPIN OLEH KASUBDITBINOPS DITPOLAIR BAHARKAM POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 118 ORANG DENGAN TUGAS:

- MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PATROLI DI WILAYAH PERAIRAN UNTUK MENCEGAH MUNCULNYA ANCAMAN DAN GANGGUAN KAMTIBMAS DARI WILAYAH TERSEBUT;

b) SUBSATGAS POLUDARA

DIPIMPIN OLEH KASUBDITOPSDARA DITPOLUDARA BAHARKAM POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 80 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PATROLI UDARA SERTA SEBAGAI SARANA KODAL PIMPINAN PADA SETIAP KEGIATAN PEMILU;
- MENDUKUNG SARANA ANGKUTAN UDARA KEPADA SATGAS LAINNYA DAN UNTUK KEPENTINGAN OPERASI MAUPUN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU SERTA

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK SAR DAN ESCAPE;

- PLOTING PENUGASAN DI SELURUH WILAYAH HUKUM NKRI;

c) SUBSATGAS PROPAM

DIPIMPIN OLEH PEMERIKSA UTAMA ROPROVOS DIVPROPAM POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 26 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MELAKUKAN PENGAMANAN MATERIIL, BAHAN KETERANGAN DAN KEGIATAN OPERASI;
- MELAKUKAN PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN TERHADAP PERSONEL OPERASI DARI KEMUNGKINAN ADANYA KEBERPIHAKAN KEPADA SALAH SATU PARPOL ATAU CALON (MENJAGA NETRALITAS);
- MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PERSONEL YANG TERLIBAT DALAM OPERASI (OPERASI BERSIH);
- PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA;

d) SUBSATGAS HUMAS

DIPIMPIN OLEH KABAGPENUM BIROPENMAS DIVHUMAS POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 16 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MELAKUKAN KEGIATAN PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN OPERASI;
- MELAKUKAN PRESS RELEASE DAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK;

- MELAKUKAN COUNTER OPINI DAN KLARIFIKASI BERITA UNTUK KEPENTINGAN SERTA KELANCARAN OPERASI;
- PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA;

e) SUBSATGAS DOKKES

DIPIMPIN OLEH KASUBBAG DALANEV BAGBINOPSNALMED PUSDOKKES POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 30 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERUPA UPAYA KESEHATAN PREVENTIF, PROMOTIF DAN KURATIF;
- PELAYANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN;
- MELAKSANAKAN EVAKUASI MEDIK;
- MELAKSANAKAN PATROLI KESEHATAN DAN MENGAKTIFKAN POSKO PENGAMANAN MEDIK;
- PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA;

f) SUBSATGAS SARPRAS

DIPIMPIN OLEH KASUBBAGJINNIS BAGADA ROPAL SSARPRAS POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 16 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MENYIAPKAN DUKUNGAN MATERIIL, LOGISTIK, SARANA DAN PRASARANA OPERASI SERTA MTP POLRI;
- MENYIAPKAN DUKUNGAN ALAT TRANSPORTASI BAGI PERSONEL PENGAMANAN PEMILU;
- PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA;

g) SUBSATGAS TI

DIPIMPIN OLEH KABAGOPSNALKOM ROTEKOM DIVTI POLRI, PERKUATAN SEBANYAK 21 ORANG, DENGAN TUGAS:

- MENGGELAR SARPRAS KOMLEK BERUPA JARING KOMUNIKASI POLRI DALAM RANGKA MENDUKUNG KELANCARAN OPERASI;
- MENYIAPKAN VIDEO CONFERENCE ATAU TELECONFERENCE UNTUK KODAL ATAU ARAHAN PIMPINAN;
- MENGKOORDINIR DAN MENGATUR PELIBATAN JARING KOMUNIKASI DI LUAR POLRI (RAPI, ORARI, SENKOM, DLL) GUNA MENDUKUNG KELANCARAN OPERASI;
- PLOTING PENUGASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA;

17. SINERGITAS PENGAMANAN PEMILU

SINERGI DALAM PENGAMANAN PEMILU SANGAT DIPERLUKAN MENURUT ***STEPHEN R. COVEY, 1993, PRINCIPLES CENTERED LEADERSHIP*** "PEKERJAAN YG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA LEBIH BAIK HASILNYA DARIPADA DIKERJAKAN SENDIRI-SENDIRI, SELAIN ITU GABUNGAN BEBERAPA UNSUR AKAN MENGHASILKAN SUATU PRODUK YG LEBIH UNGGUL" KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN SEPERTI OPERASI ATAUPUN KEGIATAN GABUNGAN YANG MELIPUTI POLRI, TNI DAN INSTANSI TERKAIT LAIINYA DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU.

PRINSIP SINERGI YAITU SALING MEMBANTU, SALING MEMPERKUAT DAN SALING MENDUKUNG DIHADAPKAN PADA MASALAH BANGSA YANG TERUS BERKEMBANG SEHINGGA PELAKSANAAN PEMILU AKAN BERJALAN AMAN DAN LANCAR. LANCARNYA PEMILU AKAN MEMBAWA KEBERLANGSUNGAN PEMERINTAH DAN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

OLEH KARENA ITU PERLU DIKAWAL DAN DIAMANKAN PROSES PEMILU SEHINGGA TERPILIH PEMIMPIN BANGSA

POLRI MENYADARI BAHWA TUGAS MEWUJUDKAN KAMDAGRI YANG MANTAP DAN KONDUSIP DALAM PEMILU 2014 HARUS DILAKUKAN SECARA SINERGI DAN KOMPREHENSIF DENGAN INSTANSI TERKAIT, TNI, PENYELENGGARA PEMILU, PESERTA PEMILU DAN POTENSI MASYARAKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. SINERGI YANG DIBANGUN DALAM PENGAMANAN PEMILU 2014 INI DIMAKSUDKAN UNTUK SALING MEMBANTU, SALING MEMPERKUAT DAN SALING MENDUKUNG GUNA MENGATASI DAN MENGHADAPI PERMASALAHAN YANG MUNCUL DAN DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PESTA DEMOKRASI PEMILU 2014. HAL TERSEBUT MENGINGAT STRATEGISNYA PEMILU 2014 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KEPEMIMPINAN NASIONAL, KEBERLANGSUNGAN PEMERINTAHAN DAN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DALAM MENINGKATKAN SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF MELALUI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT, STRATEGI POLMAS MERUPAKAN STRATEGI YANG DIKEMBANGKAN DALAM PENERAPAN PERPOLISIAN MASYARAKAT. STRATEGI INI DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI YANG INTENSIF DENGAN KOMUNITAS MASYARAKAT, DENGAN TUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SAMAPTA DAN PATUH HUKUM. DIANTARANYA KOMUNITAS LSM YANG PEDULI TERHADAP PEMILU, KOMUNITAS MASYARAKAT SADAR KAMTIBMAS, MEDIA MASSA DAN KOMUNITAS LAINNYA.

KEGIATAN POLMAS TERSEBUT DILAKUKAN, DIANTARANYA DENGAN MENGHIMBAU DAN MEMBERI PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT AGAR MELAKUKAN PENGAMANAN SWAKARSA DI LINGKUNGAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN SWASTA DAN PEMUKIMAN. SELAIN ITU, BERSAMA-SAMA DENGAN TOKOH NASIONAL, TOKOH PARPOL, TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA, TOKOH PEMUDA MENYAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN

ATAU MASSANYA AGAR TETAP MENJAGA SITUASI YANG SELAMA INI SUDAH KONDUSIP,TIDAK MUDAH TERPROVOKASI OLEH ISU-ISU YANG TIDAK BENAR DAN APABILA ADA PERMASALAHAN PEMILU AGAR DISELESAIKAN SESUAI KETENTUAN HUKUM DAN TIDAK MENGGUNAKAN CARA-CARA YANG MELANGGAR HUKUM SEPERTI PEMAKSAAN KEHENDAK DAN ATAU AKSI MASSA ANARKHIS.

SEDANGKAN PENINGKATAN SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA PEMERINTAH DAERAH DILAKUKAN MELALUI SINERGI POLISIONAL INTER DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RENSTRA POLRI 2010-2014. SINERGI INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK SESUAI DENGAN PERAN, FUNGSI DAN TUGAS MASING-MASING GUNA MENGOPTIMALKAN PRODUKTIVITAS KINERJA DAN MENGELIMINIR BERBAGAI POTENSI GANGGUAN KAMTIBMAS MENJELANG, PADA SAAT DAN PASCA PEMILU 2014. SINERGI TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN KPU, BAWASLU, PEMDA, PARPOL, MEDIA MASSA, DAN TNI. WUJUD DARI SINERGI POLISIONAL TERSEBUT ANTARA LAIN DIKEMBANGKAN DALAM BENTUK KESEPAKATAN ATAU MELAKUKAN PROGRAM KEGIATAN SECARA BERSAMA.

KEGIATAN SINERGI POLISIONAL DENGAN INSTANSI LINTAS SEKTORAL DILAKUKAN DALAM BENTUK RAPAT KOORDINASI, KEGIATAN SOSIALISASI, PENGAMANAN KEGIATAN KPU DAN PARPOL, BANTUAN SARANA UNTUK MENSUKSESKAN PEMILU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBUATAN NOTA KESEPAHAMAN, DIANTARANYA NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN AGUNG NOMOR: 01/NKB/BAWASLU/I/2013, NOMOR: B/2/I/2013,NOMOR: KEP-005/A/JA/01/2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU, NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

03/KB/KPU/TAHUN 2013,NOMOR: B/3/I/2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 TENTANG PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR: B/4/I/2013 NOMOR: B/306/I/2013 TANGGAL 28 JANUARI 2013 TENTANG PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

18. KEKUATAN BRIMOB DALAM MENGHADAPI KONTINJENSI

SITUASI NASIONAL MENJELANG PELAKSANAAN PEMILU 2014 CENDERUNG NAIK DAN AKAN TERUS NAIK SELAMA PROSES PEMILU, SEHINGGA POLRI PERLU MERENCANAKAN PENGGELARAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGHADAPI SITUASI KONTINJENSI YANG DIPERKIRAKAN AKAN MUNCUL SELAMA PROSES PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014.

KORBRIMOB POLRI SEBAGAI KEKUATAN PEMUKUL DALAM MENGHADAPI SITUASI KONTINJENSI TELAH DI SEBAR DI SELURUH INDONESIA SEHINGGA DALAM PROSES BACK UP KEKUATAN AKAN SEMAKIN CEPAT PENANGANANYA. DALAM HAL BACK UP KEKUATAN KORBRIMOB POLRI DITENTUKAN BERDASARKAN 1/3 KEKUATAN RIIL DARI WILAYAH TERSEBUT, RAYONISASI SERTA JARAK TEMPUH DAN KETERSEDIAAN SARANA TRANSPORTASI DEMI EFEKTIFNYA ANGGARAN YANG DIKELUARKAN.

JUMLAH KEKUATAN BRIMOB SELURUH INDONESIA SEBANYAK 33.818 ORANG, TERDIRI DARI KEKUATAN KORBIMOB POLRI SEBANYAK 5.395 DAN BRIMOB POLDA SEBANYAK 28.423 ORANG. DIHARAPKAN DENGAN PERKUATAN YANG ADA AKAN DAPAT MEMINIMALISIR SITUASI KONTINJENSI YANG TERJADI DI WILAYAH TERSEBUT.

IV. ASTA SIAP PEMILU TAHUN 2014

ASTA SIAP MERUPAKAN KRITERIA KESIAPAN YANG HARUS DIMILIKI KESATUAN POLRI MELIPUTI DELAPAN KESIAPAN YANG TERDIRI DARI : SIAP PILUN, SIAP POSKO, SIAP LATPRAOPS, SIAP KONDISI KAMTIBMAS, SIAP MASYARAKAT, SIAP KUAT PERS, SIAP SARPRAS DAN SIAP ANGGARAN DALAM PENGAMANAN PEMILU 2014.

1. SIAP PILUN

KESIAPAN PIRANTI LUNAK DISINGKAT SIAP PILUN ADALAH KESIAPAN TERHADAP SELURUH PRODUK ADMINISTRASI/DOKUMEN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PENGAMANAN PEMILU MULAI DARI TAHAP PERSIAPAN, PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN PASCA PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014. SIAP PILUN MELIPUTI :

a. DIREKTIF/STR ARAHAN KAPOLRI;
b. PRODUK INTELIJEN YANG MELIPUTI KIRKA, KIRSUS, KIRPAT;
c. RENCANA OPERASI (RENOPS);
d. PERINTAH OPERASI (PO);
e. SURAT PERINTAH PELAKSANAAN OPERASI (SPRINLAKOPS);
f. SURAT PERINTAH OPERATOR MISPAMLU;
g. RENCANA LATIHAN PRAOPERASI;
h. SURAT PERINTAH PESERTA PELATIHAN PRAOPERASI;
i. RENCANA PENGAMANAN SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014;
j. JADWAL PIKET POSKO OPERASI;
k. RENCANA LATIHAN KONTINJENSI (RENLAT KONTINJENSI);
l. PERKAP NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN MASSA;
m. PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN;
n. PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA;
o. PROTAP NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKI;

p. PERKAP NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN;

q. PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;

r. BUKU PERUNDANG - UNDANGAN/ PERKAP/ SOP/ PROTAP LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN OPERASI MANTAP BRATA–2014;

2. SIAP POSKO

KESIAPAN POS KOMANDO DISINGKAT SIAP POSKO ADALAH KESIAPAN RUANGAN/TEMPAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PUSAT PENGENDALIAN BESERTA SARANA PRASARANANYA DALAM RANGKA MENDUKUNG OPERASI MANTAP BRATA-2014. KESIAPAN RUANGAN/TEMPAT UNTUK MENUNJANG GIAT OPERASI MANTAP BRATA-2014 YANG TERPELIHARA DENGAN BAIK SERTA SISTEM PENYAJIANNYA DALAM BENTUK DIGITAL DAN DIGELAR DALAM RUANG POSKO OPERASI YANG MELIPUTI :

a. PANEL DATA OPERASI

1) SITUASI

a) PETA DAERAH OPERASI;

b) ASTAGATRA;

c) ANALISA SWOT;

d) PERMASALAHAN;

e) POTENSI GANGGUAN (PG);

f) AMBANG GANGGUAN (AG);

g) GANGGUAN NYATA (GN);

h) SASARAN OPERASI;

i) TARGET OPERASI;

j) CARA BERTINDAK;

2) TUGAS POKOK

a) STRUKTUR ORGANISASI;

b) PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM OPERASI;

c) JOB DESCRIPTION;

3) PELAKSANAAN

a) PENAHAPAN OPERASI

(1) TAHAP PERSIAPAN;

(2) TAHAP PELAKSANAAN;

(3) TAHAP PENGENDALIAN;

b) RENCANA KEGIATAN SATGAS;

c) TABULASI KEJADIAN;

d) HASIL GIAT SATGAS;

e) LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN;

f) HASIL ANEV HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN;

4) KODAL

a) INSTRUKSI DAN KOORDINASI;

b) SISTEM PELAPORAN;

c) JARINGAN KOMUNIKASI;

b. KELENGKAPAN RUANG POSKO :

1) TELEPON;

2) HANDY TALKY (HT);

3) FAKSIMILE;

4) KOMPUTER;

5) LCD PROYEKTOR;

6) TELEVISI;

7) INTERNET;

8) GPS;

9) CCTV;

10) AUDIO VICON;

11) JAM DINDING;

12) WHITE BOARD;

13) PERLENGKAPAN MEUBELER;

14) PAPAN TABULASI;

15) TACTICAL TABLE GAME ATAU TACTICAL FLOOR GAME ATAU TACTICAL WALL GAME;

c. KELENGKAPAN ADMINISTRASI POSKO:

1) BUKU PIKET POSKO YANG MEMUAT TENTANG JADWAL, TUGAS PIKET DAN KEGIATAN PIKET POSKO;

2) BUKU MUTASI KEGIATAN OPERASI MANTAP BRATA – 2014, YANG BERISIKAN KEKUATAN YANG BERTUGAS, KEGIATAN SELURUH OPERASI YANG DILAKUKAN, KEJADIAN YANG MENONJOL, DAN ATENSI PIMPINAN SERTA DINAMIKA OPERASI;

3) BUKU SUPERVISI/KUNJUNGAN PIMPINAN YANG MEMUAT PEJABAT YANG BERKUNJUNG, TEMUAN, PETUNJUK DAN ARAHAN;

4) BUKU EKSPEDISI BERISI PENCATATAN KELUAR MASUKNYA SURAT / LAPORAN

5) BUKU NOTULEN;

6) MAP;

7) BELANGKO LAPORAN HARIAN;

8) ATK;

3. SIAP SIAP LATPRA OPS

KESIAPAN LATIHAN PRAOPERASI DISINGKAT SIAP LATPRAOPS ADALAH KESIAPAN SATUAN KEWILAYAHAN UNTUK MELAKSANAKAN PELATIHAN BERUPA TEORI DAN PRAKTIK GUNA PENINGKATAN KEMAMPUAN, KETERAMPILAN TUGAS KEPOLISIAN DAN KESAMAAN POLA TINDAK DALAM PENGAMANAN PEMILU 2014. PELATIHAN YANG BERUPA TEORI DAN PRAKTIK DALAM RANGKA KESIAPAN YANG DILAKSANAKAN SEBELUM OPERASI KEPOLISIAN DIGELAR, YANG MELIPUTI LATPRAOPS MANTAP BRATA-2014 DAN LATPRAOPS HADAPI KONTINJENSI DENGAN RENCANA GARIS BESAR PELATIHAN SEBAGAI BERIKUT:

a. TEMA PELATIHAN;

b. TUJUAN PELATIHAN YAITU KETERPADUAN DAN KESAMAAN BERTINDAK FUNGSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEMILU 2014;

c. SASARAN PELATIHAN MELIPUTI:

1) PERSONEL SECARA TEKNIS/TEORITIS PAHAM DAN MENGERTI TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA SESUAI FUNGSI KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILU;

2) PERSONEL SECARA TAKTIS MAMPU MENERAPKAN MATERI LATIHAN SATGASPUS/SATGASDA/SATGASRES LATPAM VVIP CAPRES/CAWAPRES, LAT FOOD SECURITY / MEDICAL SECURITY, LATIHAN TERPADU DAN LATIHAN MENGHADAPI KONTINJENSI;

d. KOMPONEN LATIHAN (INSTRUKTUR, MATERI PELATIHAN/HANJAR, PESERTA, SARPRAS PENDUKUNG LATIHAN (ALUT, ALSUS), DUKUNGAN ANGGARAN, PENYELENGGARA DAN JADWAL LATIHAN);

e. METODE, TINGKAT DAN SIFAT PELATIHAN;

f. TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN;

g. LAPORAN HASIL DAN ANEV PELATIHAN;

4. SIAP KONDISI KAMTIBMAS

KESIAPAN KONDISI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DISINGKAT SIAP KONDISI KAMTIBMAS ADALAH KESIAPAN KESATUAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPOLISIAN DAN OPERASI KEPOLISIAN GUNA MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILU 2014.

SIAP KONDISI KAMTIBMAS YAITU MENCIPTAKAN SUATU KEADAAN DI MASYARAKAT YANG BEBAS DARI BAHAYA BAIK BERUPA TINDAK PIDANA MAUPUN PELANGGARAN DENGAN MELAKUKAN:

a. KEGIATAN KEPOLISIAN MELALUI LANGKAH–LANGKAH PREEMTIF, PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP POTENSI KERAWANAN (PG DAN AG) DAN GANGGUAN KAMTIBMAS (GN) YANG DAPAT MENGGANGGU KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014;

b. CIPTA KONDISI MELALUI OPERASI KEWILAYAHAN SEPERTI OPERASI PEKAT, OPERASI PREMANISME, OPERASI JUDI, OPERASI SIKAT DAN OPERASI ANTIK;

c. OPERASI TERPUSAT YAITU OPERASI MANTAP BRATA – 2014 DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014;

5. SIAP MASYARAKAT

KESIAPAN MASYARAKAT DISINGKAT SIAP MASYARAKAT ADALAH KESIAPAN KESATUAN UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN POLMAS GUNA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF MENJELANG, PADA SAAT DAN PASCA PEMILU TAHUN 2014.

SIAP MASYARAKAT BERUPA KESIAPAN SELURUH KOMPONEN BANGSA DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014 MELALUI:

a. SOSIALISASI DAN IMBAUAN UNTUK BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DILINGKUNGANNYA DAN TUMBUHNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN DAN MENGINFORMASIKAN PERMASALAHAN/KEJADIAN YANG ADA DI LINGKUNGANNYA;

b. PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT DAN TIDAK MUDAH TERPROVOKASI OLEH ISU–ISU YANG TIDAK BENAR;

c. SAMBANG DAN TATAP MUKA KEPADA TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, TOKOH PEMUDA, TOKOH MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI AKTIF MENGAJAK MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DI LINGKUNGANNYA;

d. PATROLI DIALOGIS DILAKSANAKAN PADA LOKASI RAWAN KRIMINALITAS DAN RAWAN KONFLIK YANG DAPAT MENIMBULKAN GANGGUAN KAMTIBMAS, DENGAN MELAKUKAN INTERAKSI LANGSUNG TERHADAP KOMUNITAS MASYARAKAT UNTUK MENYAMPAIKAN INFORMASI TERBARU

TERKAIT SITKAMTIBMAS DAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHANNYA SERTA MENDORONG KOMUNITAS UNTUK MEMILIKI DAYA CEGAH DAN DAYA TANGKAL TERHADAP GANGGUAN KAMTIBMAS YANG AKAN MUNCUL;

e. OPTIMALISASI BHABINKAMTIBMAS UNTUK MENGGELORAKAN KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS, FKPM DAN KOMUNITAS MASYARAKAT LAINNYA DALAM MENGELOLA KEAMANAN DI LINGKUNGANNYA;

f. PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN KOMUNITAS YANG ADA DIWILAYAHNYA UNTUK BERSAMA–SAMA POLRI MENYELESAIKAN PERMASALAHAN/KONFLIK AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS.

6. SIAP KUAT PERS

KESIAPAN KEKUATAN PERSONEL DISINGKAT SIAP KUAT PERS ADALAH KESIAPAN PERSONEL, KEMAMPUAN DAN PERLENGKAPAN PERORANGAN UNTUK MENGHADAPI SETIAP ANCAMAN/GANGGUAN KAMTIBMAS MENJELANG, PADA SAAT DAN PASCA PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014, MELIPUTI :

a. JUMLAH PERSONEL YANG DILIBATKAN DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014;

b. PERALATAN YANG DIGUNAKAN PERSONEL;

c. KOMPETENSI/KEMAMPUAN PERSONEL DALAM PENGAMANAN PEMILU 2014 (PENYIDIK, PENYELIDIK, WANTEROR, JIBOM, TURJAWALI, NEGOSIATOR, DALMAS, PHH, DAN LAIN LAIN);

d. POLA PENGAMANAN DAN CARA BERTINDAK DI LAPANGAN DALAM SETIAP TAHAPAN PEMILU TAHUN 2014;

e. PENGGELARAN KEKUATAN DI LAPANGAN;

f. PELIBATAN TNI DAN LINMAS;

g. PERGESERAN PASUKAN;

7. SIAP SARANA DAN PRASARANA

KESIAPAN SARANA PRASARANA DISINGKAT SIAP SARPRAS ADALAH KESIAPAN PERALATAN UTAMA DAN PERALATAN KHUSUS YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAMANAN PEMILU 2014.

SARANA MENGGUNAKAN INVENTARIS YANG ADA SESUAI KEBUTUHAN DAN RENCANA OPERASI MANTAP BRATA-2014, ANTARA LAIN:

a. ALUT FUNGSI;
b. ALSUS FUNGSI;
c. RANMOR;
d. RANTIS;
e. RANSUS;
f. SATWA;
g. ALKOMLEK;
h. RANSUM TAMBAHAN POLRI.
i. TENDA, KURSI, MEJA DAN VELBET.

8. SIAP ANGGARAN

KESIAPAN ANGGARAN DISINGKAT SIAP ANGGARAN ADALAH KESIAPAN ANGGARAN PENGAMANAN PEMILU 2014 UNTUK DAPAT DIDISTRIBUSIKAN SECARA TEPAT SASARAN DAN TEPAT WAKTU SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN DITETAPKAN SESUAI ANGGARAN YANG TERSEDIA, ANTARA LAIN:

a. RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN;
b. PENCAIRAN ANGGARAN;
c. DISTRIBUSI ANGGARAN;
d. PERWABKU;
e. PEMERIKSAAN KEUANGAN INTERNAL DAN EXTERNAL;

V. PENUTUP

DEMIKIANLAH NASKAH ASOPS KAPOLRI TENTANG IMPLEMENTASI ASTA SIAP DALAM MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN PENJABARAN KEBIJAKAN POLRI BIDANG OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SOPS POLRI.

"POLRI SIAP MENGAMANKAN PEMILU 2014"

Bersama Awal Dari Sukses
Tetap Bersama Kita Raih Sukses
Selalu Bersama Kita Raih Sukses Bersama - sama

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WASSALAMMUALAIKUM Wr. Wb.

ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASI

Drs. ARIF WACHYUNADI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI